

Analisis APBD Dan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari

Aisyah¹, Rachmat Agus Santoso²
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN IM
Jl. Belitung No.7, Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat
Aisyahamoy6@gmail.com¹, rachmatagussantoso@gmail.com²

ABSTRACT

A financial budget is a plan that maps financial expenditure and receipts over a certain period of time. Usually this financial planning is made for a monthly, quarterly or even annual period. In managing its finances, hospitals usually face obstacles. Problems regarding budgets are something that cannot be avoided. This research aims to analyze the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) as well as the budget realization of the Bandung Kiwari Regional General Hospital (RSUD) as indicators of financial effectiveness and efficiency. As the complexity of health service needs increases and financial pressures continue to grow, increasing understanding of budget planning and implementation is expected to help hospitals manage resource allocation more optimally. This research uses a descriptive analysis method where data is obtained based on the results of interviews and adapted so that it becomes data that explains the research issue. The data obtained is then compared with theories relevant to the research issue. The data used in this research is secondary data. The data source used in this research is a secondary data source, namely a data source that refers to information collected from existing sources. Independent variables or independent variables are variables that influence or cause changes in the dependent variable. In this research, the independent variables are regional income and expenditure. The results of the analysis show that there is a gap between the planned budget allocation in the APBD and the actual budget of the Bandung Kiwari Regional Hospital. The factors causing this gap involve various aspects, such as changes in health service needs, less than optimal financial management, and changes in regulations related to the health sector. In addition, this research identifies financial performance indicators that can be used to evaluate the financial effectiveness and efficiency of RSUD Bandung Kiwari.

Keywords : Financial Budget, Efficiency and Effectiveness Financial Management , Financial Realization, Rsud BandungKiwari

ABSTRAK

Anggaran keuangan merupakan suatu rencana yang memetakan pengeluaran dan penerimaan keuangan selama periode waktu tertentu. Biasanya perencanaan keuangan ini dibuat untuk jangka waktu bulanan, triwulan, atau bahkan tahunan. Dalam pengelolaan keuangannya Rumah Sakit biasanya memiliki kendala yang dihadapi. Permasalahan mengenai anggaran merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta realisasi anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bandung Kiwari sebagai indikator efektivitas dan efisiensi keuangan. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan pelayanan kesehatan dan tekanan

finansial yang terus berkembang, peningkatan pemahaman terhadap perencanaan dan implementasi anggaran diharapkan dapat membantu rumah sakit mengelola alokasi sumber daya dengan lebih optimal. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dimana data diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan disadur sehingga menjadi data yang bersifat menjelaskan isu penelitian. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan teori yang relevan dengan isu penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder yaitu sumber data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Variabel Independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau penyebab terjadinya perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu pendapatan dan belanja daerah. Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan antara alokasi anggaran yang direncanakan dalam APBD dan realisasi anggaran RSUD Bandung Kiwari. Faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut melibatkan berbagai aspek, seperti perubahan kebutuhan layanan kesehatan, pengelolaan keuangan yang kurang optimal, dan perubahan regulasi terkait sektor kesehatan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi indikator-indikator kinerja keuangan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi keuangan RSUD Bandung Kiwari.

Kata Kunci : Anggaran Keuangan, Efisiensi dan Efektifitas Manajemen, Realisasi Keuangan, Rsud bandung Kiwari

PENDAHULUAN

Perkembangan organisasi nirlaba di bidang pelayanan kesehatan terus meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan pembangunan, globalisasi dan era informasi. Jasa pelayanan rumah sakit termasuk dalam sektor jasa pelayanan publik. Seperti telah diketahui bahwa tujuan utama dari sektor tersebut adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, demikian pula halnya dengan rumah sakit. Rumah sakit bersifat nirlaba, namun demikian tidak berarti bahwa rumah sakit bekerja tanpa efisiensi. Rumah sakit merupakan sebuah badan usaha yang meliputi kegiatan usaha menyajikan jasa-jasa pelayanan kesehatan dan ada juga yang menambah usahanya dalam bentuk pelayanan perawatan rawat inap. Menurut (Undang-undang Republik Indonesia, 2014) yang telah di revisi dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun misi utama (Undang-undang, 2004) adalah bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dan pemerintah pusat ke pemerintah daerah tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan.

(Pemendagri, 2007) tentang perubahan Atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Pengelolaan Daerah. Mendefinisikan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. Perkembangan bidang pelayanan kesehatan yang semakin maju, setiap rumah sakit harus

berhati-hati dalam mengambil keputusan. Keputusan itu haruslah tidak keluar dari salah satu tujuan rumah sakit yaitu mencari laba, walaupun pada dasarnya merupakan organisasi nirlaba. Karena laba merupakan salah satu faktor yang menentukan kelangsungan hidup rumah sakit sebagai ukuran kinerja rumah sakit itu sendiri. Oleh karena itu setiap rumah sakit harus mempertahankan hidupnya melalui pencapaian tujuan tersebut. Suatu tujuan akan tercapai jika rumah sakit dikelola dengan kinerja yang baik sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Itu berarti penetapan suatu kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat sangat penting.

Rumah sakit pada umumnya difungsikan untuk melayani masyarakat dan menyediakan sarana kesehatan untuk masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan semata. Di dalam organisasinya, terdapat banyak aktivitas yang diselenggarakan oleh pihak-pihak dari berbagai jenis profesi, baik profesi dokter, karyawan administrasi, petugas pelayanan dan beberapa profesi lainnya. Untuk dapat menjalankan fungsinya, diperlukan sarana sistem manajemen menyeluruh yang dimulai dari proses perencanaan strategik, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Suatu proses perencanaan strategik dapat disebut baik apabila perencanaan tersebut dapat ditindak lanjuti secara praktis ke dalam program-program secara operasional yang berorientasi kepada economic, equity, quality. Artinya rumah sakit dikelola secara efektif dan efisien, melayani segala lapisan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang berkualitas. Rumah sakit dituntut untuk mampu memberikan pelayanan memuaskan, profesional, dengan harga bersaing sehingga strategik dan kinerja rumah sakit tersebut harus berorientasi pada keinginan pelanggan.

Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Laporan keuangan dibuat lebih umum dan sederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan tersebut dengan baik.

Terdapat beberapa metode dalam analisis laporan keuangan. Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Terdapat berbagai jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan keuangan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan perlu diinterpretasikan sehingga dapat dievaluasi kinerja keuangan organisasi dan selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan.

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah.

Laporan Realisasi Anggaran yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran menduduki prioritas yang lebih penting, dan Laporan Realisasi Anggaran ini merupakan jenis Laporan Keuangan Daerah yang paling

dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca, laporan operasional, serta laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintah merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu, Laporan Realisasi Anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang paling utama.

(Nafarin, 2007) meyakini, “Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang.” Menurut (Garrison, 2007) “Anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu.” (Rudianto, 2009) dalam bukunya yang berjudul Penganggaran, “Anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis.” Sedangkan menurut (Hanson, 1996) mendefinisikan anggaran sebagai suatu pernyataan formal yang dibuat oleh manajemen tentang rencana-rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam suatu periode tertentu, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama periode tersebut.

Anggaran dapat berhasil dilaksanakan apabila di dalamnya terdapat dasar-dasar anggaran yakni Adanya dorongan yang kuat dari top manajemen terhadap program penganggaran dan harus ada kerjasama diantara para pemimpin/manejer, Harus ada kejelasan wewenang tanggung jawab pada setiap tingkatan manajemen, Penetapan periode anggaran sesuai siklus akuntansi, biasanya dilakukan periode satu tahun anggaran, dengan memperhatikan faktor kemungkinan untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipercaya, serta faktor posisi persaingan dan kondisi perekonomian pada umumnya, Adanya pengetahuan dan pemahaman anggaran serta seluk – beluknya, termasuk fungsi anggaran dan cara – cara penyusunannya.

Proses penyusunan anggaran memerlukan organisasi yang memisahkan fungsi penyusunan usulan anggaran, fungsi penelaah dan pengesahan usulan anggaran dan fungsi administrasi anggaran. Komite anggaran yang anggotanya terdiri dari manajemen puncak perlu dibentuk untuk melaksanakan fungsi penelaah dan pengesahan terhadap rancangan anggaran yang diterima oleh operating managers. Dengan pendekatan top down, komite anggaran berkewajiban menetapkan kebijakan pokok perusahaan yang memberikan pedoman bagi operating managers dalam menyusun dan mengajukan rancangan anggaran mereka. Fungsi penyusunan usulan anggaran dipegang oleh pemimpin (operating managers) yang dengan pendekatan dari bawah keatas (bottom up) dalam proses penyusunan anggaran, diberikan kesempatan untuk berpartisipasi (berupa negosiasi antara penyusunan anggaran dengan komite anggaran) dalam menetapkan rancangan kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang

Adapun tiga fungsi anggaran menurut (Munandar, 2000) yaitu sebagai alat pedoman kerja, alat koordinasi, dan alat pengawasan. Fungsi pertama memposisikan anggaran sebagai rencana kerja, yang disusun berdasarkan pengalaman masa lalu dan perkiraan atas masa depan. Fungsi kedua yaitu anggaran sebagai alat koordinasi. Pada sektor ekonomi perusahaan, koordinasi merupakan suatu usaha agar semua bagian dalam perusahaan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Anggaran dalam fungsinya sebagai alat koordinasi dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan keselarasan dalam tindakan, sehingga tercipta pula keselarasan tujuan. Tindakan dalam hal ini kegiatan perusahaan yang kebutuhan dananya tercantum dalam anggaran, yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan yang berwenang (dalam hal keuangan). Kegiatan akan disetujui apabila

tidak menyimpang dari anggaran dan tujuan perusahaan. Maka dari itu, anggaran dalam fungsinya sebagai alat koordinasi mampu menyelaraskan kegiatan dan tujuan perusahaan. Fungsi ketiga yaitu anggaran sebagai alat pengawasan. Pengawasan merupakan aktivitas untuk menemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pencapaian hasil dan perencanaan aktivitas. Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya merupakan bentuk dari pengawasan tersebut. Melalui perbandingan tersebut dapat dilihat seberapa jauh slack (perbedaan) dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran, sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan dalam penyusunan anggaran periode berikutnya.

Sedangkan menurut (Kenis, 1979) Fungsi dari anggaran selain sebagai alat untuk pengendalian juga sebagai alat untuk mengkoordinasi, mengkomunikasikan, memotivasi dan mengevaluasi prestasi. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam satuan keuangan (unit moneter), dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang (Munandar 2007:1).

Anggaran Keuangan merupakan bagian yang penting dalam suatu perusahaan, karena Anggaran Keuangan memperlihatkan ekspektasi arus kas dan posisi keuangan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang terencana. Dalam penyusunan Anggaran Keuangan harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang ingin dicapai. Untuk itu didalam proses penyusunannya diperlukan personil yang memahami berbagai informasi yang relevan dengan Anggaran Keuangan.

Anggaran ada kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh dimana setiap daerah yang mempunyai anggaran tinggi akan mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat.

Menurut (Halim, 2017) menyebutkan bahwa APBD yaitu: “Sebagai alat peraturan APBD yang digunakan untuk menentukan besaran dana pendapatan dan dana pengeluaran daerah. Dana alokasi khusus yang berasal dari APBN, dana untuk mendanai khusus urusan daerah sesuai program nasional. Salah satu alat untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.”

Sedangkan Menurut (Badrudin, 2007) menyebutkan bahwa APBD yaitu: “APBD adalah suatu rancangan kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh penerimaan dan pendapatan atau pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka sasaran untuk pembangunan dalam waktu tiap tahun dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan daerah.”

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat ((Permenkes, 2010) tentang klasifikasi rumah sakit). Rumah sakit adalah institusi kesehatan profesional yang pelayanannya diselenggarakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli lainnya. Di dalam Rumah Sakit terdapat banyak aktivitas dan kegiatan yang berlangsung secara berkaitan (Haliman & Wulandari, 2012). Aktivitas jasa rumah sakit sangat terkait dengan hal berikut : pelayanan, keuangan, aturan, kepuasan pasien, manajemen, dan kondisi masyarakat.

Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari merupakan instansi dibawah naungan pemerintah daerah yang bergerak di bidang sektor publik dengan memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah bersifat sosial dan ekonomi dengan lebih mengutamakan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai salah satu instansi pemerintah harus

mampu memberikan pertanggungjawaban secara finansial kepada pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pengguna jasa. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pengukuran kinerja yang dilihat dari aspek financial rumah sakit, yang merupakan pilihan yang tepat untuk melakukan pengukuran kinerja yang dilihat dari aspek finansial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta realisasi anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bandung Kiwari sebagai indikator efektivitas dan efisiensi keuangan. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan pelayanan kesehatan dan tekanan finansial yang terus berkembang, peningkatan pemahaman terhadap perencanaan dan implementasi anggaran diharapkan dapat membantu rumah sakit mengelola alokasi sumber daya dengan lebih optimal.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan APBD, diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan yang dapat meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan sumber daya lokal. Sehingga, rumah sakit dapat memiliki kontribusi yang lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penelitian mengenai APBD dan realisasi rumah sakit dapat memberikan dampak positif pada formulasi kebijakan dan penerapan praktik terbaik dalam penyelenggaraan layanan kesehatan.

KAJIAN TEORI

Keuangan Daerah

Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu proses yang melibatkan identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (seperti kabupaten, kota, atau provinsi) untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah. Jenis laporan Keuangan Pemerintah mencakup: a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Neraca, c) Laporan Arus Kas, dan d) Catatan Atas Laporan Keuangan. Karena merupakan bagian dari akuntansi pemerintahan atau keuangan daerah, proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah juga terdapat dalam akuntansi keuangan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran adalah dokumen yang secara sistematis menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode tertentu. Laporan ini mengungkapkan aktivitas keuangan pemerintah pusat/daerah yang mencerminkan kepatuhan terhadap APBN/APBD dengan merinci detail transaksi ekonomi yang terjadi.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi mencerminkan tingkat pencapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi ini menjadi bermanfaat bagi pengguna laporan dalam melakukan evaluasi terhadap keputusan terkait alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan kepatuhan entitas pelaporan terhadap anggaran. Sehubungan dengan adanya penyandingan antara anggaran dan realisasi, penting untuk menggunakan struktur, definisi, dan basis yang seragam dalam penyusunan APBD dan pelaporan.

Ruang lingkup laporan Realisasi Anggaran melibatkan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan mencakup seluruh penerimaan kas umum daerah yang meningkatkan ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, merupakan hak pemerintah, dan tidak memerlukan pengembalian oleh pemerintah. Belanja

merangkum semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan dikembalikan oleh pemerintah. Pembiayaan (financing) mencakup setiap penerimaan yang memerlukan pengembalian atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Laporan keuangan memiliki peran krusial sebagai landasan bagi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun dengan tepat waktu dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Selain kriteria tersebut, laporan keuangan juga memerlukan pengungkapan informasi yang memadai (disclosure) mengenai aspek-aspek yang memiliki potensi memengaruhi keputusan.

Laporan keuangan yang diterbitkan di koran atau situs web pemerintah daerah pada dasarnya menyimpan informasi yang sangat bernilai jika dianalisis dengan cermat. Laporan keuangan publikasi mencakup ringkasan, klarifikasi, dan pengelompokan data keuangan organisasi. Oleh karena itu, untuk menilai kondisi keuangan suatu organisasi, baik atau tidak, dapat diketahui melalui perincian yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut.

Anggaran

Anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dan lain-lain pendapatan yang sah (LPS).

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari berbagai potensi penerimaan yang ada dan dimiliki oleh masing-masing daerah, yang selanjutnya disebut kekayaan daerah. Sesuai dengan jiwa otonomi daerah. Maka kepada pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk menggali sumber- sumber yang ada di daerah masing-masing, sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan azas desentralisasi yang kita anut.

Pada keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 29 tahun 2002, pendapatan ini dikelompokkan dalam jenis pendapatan bantuan dana kontinjensi/penyeimbang dari pemerintah dan dana darurat.

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan SAP menyatakan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeiuaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Definisi lain Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi :

- a) **Belanja Langsung**
Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
- b) **Belanja Tidak Langsung** Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi.
- c) **Belanja Modal** merupakan pengeiuaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Kelompok belanja Modal terdiri dari : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, dan Belanja Gedung dan Bangunan.

Efektifitas

Keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai efektifitas. Efektivitas berkaitan dengan hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi dan hanya membahas masalah output. Ketika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, dapat dianggap bahwa organisasi tersebut beroperasi dengan efektif. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai relasi antara keluaran (output) dan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai.

Efektivitas kegiatan operasional dinyatakan terjadi ketika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, efektifitas mencerminkan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai oleh suatu kegiatan atau kebijakan.

Pengukuran efektifitas melibatkan evaluasi tingkat output yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Evaluasi efektifitas dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Efisiensi

Efisiensi merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan output dengan tingkat optimal menggunakan input yang tersedia, dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Efisiensi dapat dijelaskan sebagai keterkaitan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan atau aktivitas dengan penggunaan sumber daya (input).

Efisiensi dapat didefinisikan sebagai pencapaian output tertentu dengan menggunakan sumber daya seefisien mungkin. Hal ini melibatkan perbandingan antara output dan input yang dihasilkan, dengan mengacu pada standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Pengukuran efisiensi bertujuan untuk mengevaluasi perbandingan antara tingkat output dan input yang terlibat dalam operasional organisasi sektor publik. Efisiensi dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja.

Selanjutnya Efisiensi penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan kedua dimensi keuangan. Suatu daerah otonom kabupaten / kota pada suatu tahun tertentu barang kali belum dapat memenuhi efisiensi tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju efisiensi yang sangat efisien.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dimana data diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan disadur sehingga menjadi data yang bersifat menjelaskan isu penelitian. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan teori yang relevan dengan isu penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder yaitu sumber data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Variabel Independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau penyebab terjadinya perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu pendapatan dan belanja daerah. Informan penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam proses anggaran keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari antara lain : manajer, Akuntan yang diasumsikan mengetahui adanya proyek yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data, transformasi data, pembuatan model data hingga mencari informasi penting dari data tersebut.

Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan antara alokasi anggaran yang direncanakan dalam APBD dan realisasi anggaran RSUD Bandung Kiwari. Faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut melibatkan berbagai aspek, seperti perubahan kebutuhan layanan kesehatan, pengelolaan keuangan yang kurang optimal, dan perubahan regulasi terkait sektor kesehatan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi indikator-indikator kinerja keuangan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi keuangan RSUD Bandung Kiwari.

Tabel 1

APBD dan Realisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari Tahun 2020

No	Jenis Biaya	APBD	Realisasi Anggaran	Selisih
-----------	--------------------	-------------	---------------------------	----------------

1	Pendapatan Asli Daerah & Pendapatan BLUD	Rp 60.200.000.000	Rp 73.854.129.882	Rp 13.654.129.882
2	Belanja Tidak Langsung	Rp 22.948.310.849	Rp 21.974.760.624	Rp 937.550.225
3	Belanja Langsung	Rp 133.969.755.550	Rp 113.252.431.917	Rp 20.717.323.633
	Total	Rp 217.118.066.399	Rp 209.081.322.423	Rp. 35.309.003.740

Dari data pada Tabel 1, dapat dilihat perbandingan antara proyeksi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan realisasi anggaran yang terjadi di tahun 2020. Realisasi pendapatan melewati estimasi anggaran, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah & Pendapatan BLUD melampaui perkiraan awal. Faktor penyebabnya dapat melibatkan peningkatan aktivitas ekonomi, pertumbuhan penerimaan pajak, atau sumber pendapatan alternatif. Realisasi anggaran belanja tidak langsung sedikit di bawah anggaran, mungkin disebabkan oleh efisiensi pengeluaran atau penundaan proyek yang telah direncanakan. Realisasi belanja langsung jauh di bawah anggaran, menunjukkan kemungkinan penundaan atau pelaksanaan tidak sepenuhnya dari beberapa proyek atau program. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi penyebabnya dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Total realisasi anggaran lebih rendah daripada proyeksi anggaran, menunjukkan ketidaksesuaian antara perkiraan dan realitas. Penyebab selisih yang signifikan perlu diidentifikasi melalui analisis lebih lanjut, dan tindakan korektif mungkin perlu diambil untuk memastikan manajemen keuangan yang lebih efisien.

Tabel 2
APBD dan Realisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari Tahun 2021

No	Jenis Biaya	APBD	Realisasi Anggaran	Selisih
1	Pendapatan Asli Daerah & Pendapatan BLUD	Rp 75.500.000.000	Rp 83.102.181.501	Rp 7.602.181.501
2	Belanja Tidak Langsung	Rp 22.619.509.374	Rp 21.786.280.215	Rp 833.229.159
3	Belanja Langsung	Rp 128.514.675.421	Rp 120.346.479.243	Rp 8.168.196.178
	Total	Rp 226.634.184.795	Rp 225.234.940.959	Rp. 16.610.606.838

Dari data pada Tabel 2, dapat dilihat perbandingan antara proyeksi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan realisasi anggaran yang terjadi di tahun 2021. Realisasi pendapatan melewati estimasi anggaran, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah & Pendapatan BLUD melampaui perkiraan awal. Faktor penyebabnya dapat melibatkan peningkatan aktivitas ekonomi, pertumbuhan penerimaan pajak, atau sumber pendapatan alternatif. Realisasi anggaran belanja tidak langsung sedikit di bawah anggaran, mungkin disebabkan oleh efisiensi pengeluaran atau penundaan proyek yang telah direncanakan. Realisasi belanja langsung jauh di bawah anggaran, menunjukkan kemungkinan

penundaan atau pelaksanaan tidak sepenuhnya dari beberapa proyek atau program. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi penyebabnya dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Total realisasi anggaran lebih rendah daripada proyeksi anggaran, menunjukkan ketidaksesuaian antara perkiraan dan realitas. Penyebab selisih yang signifikan perlu diidentifikasi melalui analisis lebih lanjut, dan tindakan korektif mungkin perlu diambil untuk memastikan manajemen keuangan yang lebih efisien.

Tabel 3
APBD dan Realisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari Tahun 2022

No	Jenis Biaya	APBD	Realisasi Anggaran	Selisih
1	Pendapatan Asli Daerah & Pendapatan BLUD	Rp 87.300.000.000	Rp 104.337.355.690	Rp 17.037.355.690
2	Belanja Tidak Langsung	Rp 25.272.972.528	Rp 22.660.991.280	Rp 2.611.981.248
3	Belanja Langsung	Rp 117.634.420.548	Rp 126.936.063.046	Rp 8.168.196.178
	Total	Rp 230.207.393.076	Rp 253.934.410.016	Rp. 27.817.533.116

Dari data pada Tabel 3, dapat dilihat perbandingan antara proyeksi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan realisasi anggaran yang terjadi di tahun 2022. Realisasi pendapatan melewati estimasi anggaran, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah & Pendapatan BLUD melampaui perkiraan awal. Faktor penyebabnya dapat melibatkan peningkatan aktivitas ekonomi, pertumbuhan penerimaan pajak, atau sumber pendapatan alternatif. Realisasi anggaran belanja tidak langsung sedikit di bawah anggaran, mungkin disebabkan oleh efisiensi pengeluaran atau penundaan proyek yang telah direncanakan. Realisasi belanja langsung jauh di bawah anggaran, menunjukkan kemungkinan penundaan atau pelaksanaan tidak sepenuhnya dari beberapa proyek atau program. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi penyebabnya dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Total realisasi anggaran lebih rendah daripada proyeksi anggaran, menunjukkan ketidaksesuaian antara perkiraan dan realitas. Penyebab selisih yang signifikan perlu diidentifikasi melalui analisis lebih lanjut, dan tindakan korektif mungkin perlu diambil untuk memastikan manajemen keuangan yang lebih efisien.

Pembahasan

Anggaran Daerah dan Realisasi jika dilihat dari Efisiensi

Dalam konteks pendapatan, efisiensi dapat dilihat dari sejauh mana pemanfaatan sumber-sumber pendapatan telah dioptimalkan. Apabila realisasi pendapatan melebihi perkiraan anggaran, ini mungkin mencerminkan keberhasilan dalam pengumpulan pajak, pertumbuhan aktivitas ekonomi, atau diversifikasi sumber pendapatan. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi praktik efisien yang dapat diadopsi pada masa mendatang.

Efisiensi dalam belanja tidak langsung dapat mencakup pengeluaran yang optimal dan penundaan proyek yang telah direncanakan. Jika realisasi sedikit di bawah anggaran,

kemungkinan terdapat upaya efisiensi dalam pengeluaran. Evaluasi mendalam diperlukan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan efisiensi ini dan untuk mempertimbangkan cara meningkatkan efisiensi pengeluaran di masa mendatang.

Tingkat efisiensi dalam belanja langsung tercermin dari sejauh mana realisasi anggaran mencapai tujuan proyek atau program. Jika realisasi jauh di bawah anggaran, mungkin diperlukan evaluasi untuk menilai sejauh mana efisiensi pelaksanaan proyek atau program tersebut. Identifikasi langkah-langkah korektif dan peningkatan proses perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan manfaat maksimal.

Melalui analisis total realisasi anggaran dibandingkan dengan anggaran keseluruhan, dapat dinilai efisiensi keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi menunjukkan potensi untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran atau untuk meningkatkan akurasi proyeksi anggaran di masa mendatang.

Tetap penting untuk terus melakukan evaluasi dan pemantauan efisiensi di setiap sektor anggaran, baik pada pendapatan maupun belanja, guna memastikan pemanfaatan optimal dari sumber daya publik. Langkah-langkah perbaikan dan inovasi dalam manajemen anggaran dapat menjadi kunci untuk mencapai efisiensi yang lebih baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Anggaran Daerah dan Realisasi jika dilihat dari Efektifitas

Efektivitas pendapatan mencerminkan seberapa baik sumber-sumber pendapatan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Jika realisasi pendapatan melebihi anggaran, hal ini mungkin menandakan efektivitas dalam pengumpulan pajak, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan, atau diversifikasi sumber pendapatan. Analisis lebih lanjut dapat membahas praktik-praktik efektif yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pendapatan.

Efektivitas belanja tidak langsung dapat dinilai dari sejauh mana pengeluaran tersebut mendukung tujuan dan kebijakan daerah. Jika realisasi sedikit di bawah anggaran, mungkin perlu dievaluasi apakah pengeluaran tersebut secara efektif menghasilkan dampak yang diinginkan. Tindakan efektivitas dapat diidentifikasi untuk meningkatkan pencapaian tujuan.

Efektivitas belanja langsung tercermin dari sejauh mana realisasi anggaran mencapai hasil yang diinginkan untuk proyek atau program. Jika realisasi jauh di bawah anggaran, evaluasi diperlukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan proyek atau program tersebut. Langkah-langkah korektif dan peningkatan proses dapat diimplementasikan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan dampak yang maksimal.

Melalui evaluasi total realisasi anggaran dibandingkan dengan anggaran keseluruhan, dapat dianalisis efektivitas keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi dapat menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan efektivitas pengeluaran atau untuk meningkatkan proyeksi anggaran agar lebih akurat di masa mendatang.

Dengan menyoroti efektivitas, pembahasan dapat difokuskan pada keberhasilan mencapai tujuan dan dampak yang diinginkan. Evaluasi yang terus-menerus penting untuk memastikan bahwa setiap bagian anggaran, baik pendapatan maupun belanja, efektif dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut. Langkah-langkah perbaikan dan inovasi dapat diadopsi untuk memastikan efektivitas yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dalam upaya menilai kesehatan finansial institusi kesehatan, artikel ini melaksanakan evaluasi mendalam terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta eksekusi anggaran keuangan rumah sakit. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap penyaluran dana dan administrasi keuangan rumah sakit memegang peranan penting dalam mempertahankan efisiensi dan keberlanjutan pelayanan kesehatan.

Secara menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa APBD menjadi dasar utama untuk mengukur sumber daya keuangan yang dialokasikan kepada rumah sakit. Meskipun demikian, kesuksesan pelaksanaan anggaran ini bergantung pada rumah sakit dalam mengimplementasikan dana dengan cara yang efektif dan efisien. Evaluasi yang teliti terhadap pelaksanaan anggaran keuangan rumah sakit menjadi faktor kunci untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dalam manajemen keuangan, termasuk peningkatan efisiensi operasional dan penyediaan pelayanan kesehatan.

SARAN

Sebagai saran, penelitian ini menegaskan perlunya kerjasama erat antara pemerintah daerah dan rumah sakit dalam mengembangkan kebijakan keuangan yang mendukung kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, analisis APBD dan pelaksanaan anggaran keuangan rumah sakit bukan hanya berfungsi sebagai alat evaluasi semata, tetapi juga sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan demi meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin. (2007). *Strategi pengembangan APBD* (Vol. 813). <https://doi.org/10.31291/jlk.v15i1.522>
- Garrison, N. and B. (2007). *Pengertian Anggaran* (Vol. 4).
- Halim. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah*. .
- Haliman, & Wulandari. (2012). *Aktivitas Rumah Sakit*.
- Hanson. (1996). *The budgetary Controll Function". The Accounting Review*.
- Kenis. (1979). *Effects of Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance. The Accounting Review*, .
- Munandar. (2000). *Fungsi Anggaran*.
- Nafarin, M. (2007). *Penganggaran Perusahaan*.
- Pemendagri. (2007). *Pedoman Keuangan Pengelolaan Daerah*.
- Permenkes. (2010). *tentang klasifikasi rumah sakit*.
- Rudianto. (2009). *Penganggaran* (Erlangga, Ed.).
- Undang-undang. (2004). *efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan*.
- Undang-undang Republik Indonesia. (2014). *Pemerintahan Daerah*.